

BAB III

FLUKTUASI KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISU RANJAU DUNIA

Setelah pada bab sebelumnya kita menyusuri rentangan sejarah bagaimana ranjau darat berinteraksi, dipergunakan, dan berusaha untuk dibasmi dari pergaulan internasional. Sekarang kita akan melihat bagaimana ranjau darat ditinjau dari persepektif Amerika Serikat.

A. Ranjau Darat dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat sama sekali tak pernah menolak *Ottawa Process* secara terang-terangan. Mereka memang hanya tak mau meratifikasi konvensi itu dengan berbagai alasan. Pada tahun 1998, Amerika Serikat mengumumkan kebijakannya bahwa selambat-lambatnya tahun 2003, mereka sudah akan melucuti semua senjata anti-personil mereka yang tersebar dipangkalan militer mereka di beberapa negara, kecuali di Korea Selatan. Tetapi kebijakan ini tidak meliputi amunisi-amunisi yang digolongkan kedalam kategori *mixed munition*. *Mixed munition* yang dimaksud adalah jenis ranjau yang bisa digunakan sebagai ranjau *anti-tank* dan anti-personil sekaligus. Hal ini bisa dibaca lewat cara yang lebih skeptik, bahwa Amerika Serikat berjanji pada dunia akan melucuti semua ranjau kuno mereka dan tetap mempertahankan senjata mereka yang modern. Bukankah ranjau yang memiliki

personil memang sudah kuno? Sehingga tanpa konvensi apapun juga, ranjau-ranjau semacam itu memang sudah tidak lagi dipakai.

Lebih lanjut, Amerika Serikat menegaskan semacam iming-iming bagi para lobiis, bahwa apabila mereka tak menerapkan kebijakan tersebut pada waktu yang ditentukan, maka Amerika Serikat bersedia diberi sanksi berupa perlucutan semua senjatanya, termasuk di Korea Selatan, termasuk jenis *mixed munitions*. Kebijakan ini disampaikan dalam surat yang berasal langsung dari Presiden Bill Clinton. Tetapi karena isinya dirahasiakan, maka poin-poin dalam surat tersebut disampaikan dihadapan publik lewat surat dari Sandy Berger, Presiden *National Security Adviser* Amerika Serikat. Surat tersebut sejatinya ditujukan pada senator Patrick Leahy dari kubu Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Vermont. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melucuti semua macam ranjau apabila kelak telah ditemukan alternatif yang benar-benar suportif untuk menggantikan peranan ranjau secara militeristik. Surat Berger tersebut adalah tanggapan atas desakan terus menerus dari senator Patrick Leahy agar pemerintah bersegera melucuti ranjaunya baik yang dipangkalkan didalam negari maupun di luar negeri. Senator Patrick Leahy dikenal sebagai politikus yang paling vokal dalam gerakan resistensi ranjau darat, khususnya di Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya pada tanggal 22 Mei 1998, Senator Leahy menyatakan bahwa Amerika Serikat harusnya tidak usah ragu lagi dalam menandatangani *Ottawa Process*. Tapi kalau memang dalihnya adalah meminta tanggapan untuk menanti

alternatif, bukannya dengan menandatangani *Ottawa Process* disisi lain akan mendukung percepatan untuk mencapai tujuan tersebut?²⁵

Selain Leahy, terdapat organisasi non-pemerintah yang cukup berpengaruh melobi pemerintah untuk mendukung *Ottawa Process* dengan meratifikasinya, yakni *The United States Campaign to Ban Landmines* (USCBL). USCBL juga getol menyurati presiden Bill Clinton dalam rangka mempengaruhi pemerintah, dalam salah satu surat mereka, USCBL menegaskan alasan kenapa pemerintah Amerika Serikat tidak boleh menunda-nunda ratifikasi *Ottawa Process*

“First, ...we believe that eight years is too late for the world to wait for U.S. signature on the Mine Ban Treaty.... Second...we are concerned that the U.S. is retaining one million of these deadly ‘dumb’ mines for use in Korea.... Third, we are concerned that the commitment to sign by 2006 is contingent on developing and fielding by that date alternatives to antipersonnel landmines.... Fourth, we are concerned that...the U.S. has pressured its NATO and other allies who have signed the treaty to allow continued U.S. stockpiling of antipersonnel mines on their territories.... Finally, we urge you in the strongest terms to instruct the Pentagon not to go ahead with the proposed...redesign of the remote anti-armor mine (RAAM) system to include ADAM antipersonnel mines.... The proposed redesign conflicts with your stated policy to sign the treaty by 2006.”²⁶

²⁵http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=1999&pqs_type=l m&pqs_report=usa (diakses pada tanggal 2 November 2010, Pukul 15.38 WIB)

²⁶http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=1999&pqs_type=l m&pqs_report=usa (diakses pada tanggal 2 November 2010, pukul 15.46 WIB)

Pada tahun 1992, atas prakarsa Senator Leahy, pemerintah membuat penundaan (moratorium) satu tahun untuk “mengurusi” ranjau, hal ini bisa dihitung sebagai kemajuan mengingat sebelumnya pemerintah Amerika Serikat tidak pernah punya rencana konkret mengenai ranjau. Pemerintah juga menerbitkan *Hidden Killers: The Global Problems with Uncleared Landmines*, yang selain menjadi catatan mengenai berbahayanya ranjau, juga bisa dianggap sebagai sebuah medium pendidikan resiko. Tahun 1994, Presiden Clinton melahirkan sebuah inisiatif untuk mengajak negara-negara dalam “menghapuskan” ranjau dari roda aktifitas sehari-hari. Rencana ini disambut baik oleh Sidang Umum PBB dan “mensponsorinya”. Para partisipan dalam agenda yang diadakan tahun 1995 itu bersepakat untuk mengeliminasi ranjau secara bersama-sama mulai tahun 1996. Kesepakatan ini juga disetujui sebagai hukum PBB pada tahun tersebut. Proyek eliminasi mencakup seluruh ranjau diwilayah-wilayah yang bukan perbatasan. Perjanjian ini sudah mulai membuahkan hasil pada tahun 1998, namun niat negara-negara partisipan merasa niat baiknya tidak dihargai ketika Amerika Serikat terus saja menunda untuk mengeliminasi ranjaunya sendiri secara serius. Penundaan ini Bill Clinton sendiri yang memulai, sebab kongres telah bersepakat untuk menyerahkan hal ini pada Presiden. Kesepakatan hukum tersebut akhirnya gugur sendiri.

Tingkah polah Amerika Serikat yang “janggal” dimulai pada awal tahun 1996 ketika mereka menolak meratifikasi *Convention on Conventional Weapons (CCW)* dan Protokol II nya yang mengatur masalah pembatasan penggunaan ranjau. Pada

acara tersebut Amerika Serikat malah mempromosikan produk mereka yang dinamainya "*Smart-Mine*", semacam ranjau pintar yang tahu kapan harus meledak dan kapan harus diam, sebagai alternatif dari ranjau anti-personil yang selama ini digunakan dan sebentar lagi akan dieliminasi berdasarkan sejumlah konvensi. Tingkah Amerika Serikat membuat ICBL geram, sebab secara tujuan, Amerika Serikat sama saja melanjutkan tradisi pemakaian ranjau diantara negara-negara. CCW berakhir pada tanggal 3 Mei 1996 dengan wajah kecut Amerika Serikat (dan anteknya, Inggris) sebab sama sekali tak digubris dalam forum CCW yang sebagian besar dihuni oleh negara pendukung untuk melarang ranjau darat secara menyeluruh.

Tiga belas hari setelah berakhirnya CCW, yakni pada tanggal 16 Mei 1996, Presiden Bill Clinton mengeluarkan kebijakan bahwa Amerika Serikat akan memimpin upaya global (*lead global effort*) dalam melenyapkan ranjau sesuai kesepakatan CCW, serta akan mengusahakan agar bisa diadakan perjanjian legal untuk pelarangan resmi atas ranjau antipersonil dalam waktu dekat (*seek a worldwide agreement as soon as possible to end the use of all antipersonnel landmines*). Tapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini tidak memberi pengaruh apa-apa selain mengundang cibiran banyak negara yang sudah total dalam mendukung pelarangan ranjau. Sebab, Amerika Serikat hanya mencakupkan kebijakannya pada apa yang ia sebut sebagai *dumb-mines* (ranjau anti-personil konvensional) dengan menghapuskan seluruh *dumb-mines*-nya kecuali yang masih terpangkal di Korea Selatan. Tetapi tidak mencakup penggunaan *smart-mine* mereka. Amerika Serikat akan tetap terus

menggunakan dan memproduksi, serta menimbun *smart-mine*. Amerika Serikat hanya melakukan manuver politis yang menguntungkan mereka sendiri dan tidak berpihak pada kemanusiaan seperti yang dimaksud oleh negara-negara yang meratifikasi CCW. Ada atau tidak adanya kebijakan luar negeri ini, toh Amerika Serikat tetap akan membersihkan semua *dumb-mines* mereka sebagai bagian dari eksekusi efektifitas teknologi, memangkas biaya perawatan, dan keuntungan-keuntungan internal lainnya.

Muka tebal Amerika Serikat kembali ditunjukkan ketika mereka tetap saja melanjutkan mengikuti berbagai forum internasional dalam pelarangan ranjau. Dalam forum yang berlangsung pada bulan November 1996, 156 negara menyatakan mendukung, 10 negara abstain, dan tak ada negara yang menolak.²⁷ Meskipun sedemikian eksplisit bahwa partisipan memang semakin serius dalam niat mereka untuk menghapuskan ranjau, Kanada tetap tidak puas sebab mereka masih tetap trauma atas manuver-manuver politik negara-negara *superpower* via forum semacam ini. Akhirnya, bersama ICBL, Kanada yang dimotori oleh Menteri Luar Negerinya Lloyd Axworthy memprakarsai *Ottawa Process*, yang dikenal sebagai pintu gerbang memasuki kampanye serius dan menyeluruh atas ranjau darat.

Amerika Serikat menolak meratifikasi *Ottawa Process*, dan menyampaikan pada forum bahwa bukannya mereka tidak mendukung usaha bersama tersebut, tetapi mereka memilih untuk meratifikasi konvensi lain yakni *Conference of Disarmament* (CD) di Jenewa. ICBL menuding keras bahwa Amerika Serikat berusaha

²⁷ UN General Assembly, *ibid.*, 51/450, 10 February 1996, p. 1286.

menghalang-halangi perubahan mendasar pada teknik dan strategi konkret yang tengah disusun Negara-negara partisipan dalam memerangi ranjau. USCBL juga tak kalah kerasnya dalam mengancam kebijakan luar negeri pemerintahnya sendiri, tak bisa dibayangkan bagaimana kecewanya Senator Patrick Leahy.

Meskipun tidak meratifikasi Ottawa Process, Amerika Serikat punya cara untuk memberantas persoalan ranjau versinya sendiri. Mereka yang pro-Amerika Serikat tentunya akan melihat ini sebagai kebijakan yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang anti-Amerika Serikat akan melihatnya sebagai usah cari-cari perhatian belaka, lagi pula Amerika Serikat selalu mengarahkan kebijakan luar negerinya kearah yang unilateral dan unipolar, mereka dengan *snob* selalu menempatkan diri sebagai kutub terbesar dalam globe hubungan internasional.

Amerika Serikat sudah melakukan pembatasan ekspor ranjau antipersonil sejak tahun 1992. Tetapi tuntutan Internasional agar mereka menghentikan ekspor komoditas militer ini sama sekali, tak juga diindahkan. Pada tahun 2007, Amerika Serikat bahkan mengeluarkan kebijakan bahwa mereka akan tetap mengekspor ranjau antipersonil (dalam jumlah terbatas) hingga tahun 2014. Kebijakan yang sangat absurd mengingat mereka mengklaim tak lagi memproduksi dan menggunakan ranjau antipersonil sejak tahun 2001. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak diproduksi masih bisa tetap diekspor. Usut punya usut, ternyata yang di ekspor oleh Amerika bukan ranjau antipersonil sebab mereka tahu pasar pasti tak akan membelinya sebab telah nyata dilarang oleh perjanjian perjanjian internasional. Amerika Serikat

memanfaatkan teknologi *mixed-mine* yang salah satunya adalah *smart-mine*, yang tidak terliput dalam objek konvensi-konvensi internasional sebelumnya mengenai ranjau darat.

Ekspor ini tetap berjalan meskipun telah mulai terasa hambatannya. Amerika Serikat harus menarik kembali timbunan ranjau mereka dari Norwegia, Spanyol, dan Italia karena negara-negara tersebut tengah getolnya membersihkan ranjau dari wilayah yurisdiksi mereka sesuai dengan ketentuan *Ottawa Process*. Keputusan yang setengah-setengah seperti ini tidak hanya merugikan para partner interaksi Amerika Serikat melainkan juga Amerika Serikat sendiri. Antara tahun 1998 – 2008, sebanyak 207 orang warganegara Amerika Serikat sendiri menjadi korban ranjau (80 orang meninggal dunia dan 127 luka-luka). Memang minim, tapi sudah cukup untuk membuka mata warga Amerika Serikat yang lain untuk mendesak pemerintah untuk berhenti *ogah-ogahan* terhadap masalah ini.

Pada eranya, Clinton selalu berdiplomasi secara halus untuk menolak meratifikasi *Ottawa Process*, Amerika Serikat terkesan berusaha menjaga pencitraan dengan terus menawarkan alternatif-alternatif lain. Amerika Serikat juga bahkan harus menunggu menit terakhir konferensi untuk menyatakan ‘tidak’. Penolakan halus Amerika Serikat ini berubah drastis dibawah pemerintahan Bush. Bush berani menolak ratifikasi *Ottawa Process* dan perjanjian anti-ranjau lainnya secara terang-terangan. Kalau Clinton selalu berusaha menegaskan bahwa Amerika Serikat

sejati punya itikad baik dalam usaha penalarangan ranjau, tahun 2004 Bush

terang mengatakan bahwa Amerika Serikat tak punya niat sama sekali untuk meratifikasi perjanjian anti ranjau darat manapun. Diwaktu yang bersamaan, Amerika Serikat dibawah komando Bush menegaskan bahwa mereka tetap akan menggunakan ranjau darat tipe manapun tanpa ada pembatasan geografis apapun.²⁸ Meskipun pada nantinya ujaran Bush tersebut terasa hanya seperti gertakan belaka, buktinya Amerika Serikat tak lagi berani menggunakan ranjau antipersonil selain di Korea Selatan. Untuk wilayah operasi lain, Amerika Serikat lebih cenderung menggunakan *smart-mine* bikinannya. Sesuai kebijakan penggunaan ranjau semacam ini harus lewat izin khusus dari Presiden, dan sesuai undang-undang hanya boleh dilakukan hingga akhir tahun 2010.

Pada Tanggal 2 Desember 2008, Delegasi Amerika Serikat memilih abstain dalam Sidang Umum PBB, sesi resolusi 63/42 tentang implementasi penuh pelarangan ranjau. Setelah ditelusuri, ternyata Amerika Selalu bersikap abstain dalam semua Sidang Umum PBB mengenai ranjau sejak tahun 1997. Sebenci apapun Bush pada pelarangan ranjau, toh didalam forum, Amerika Serikat tak kuasa menolak, melainkan hanya abstain. Penjelasan yang holistik dan cukup eksplisit terlontar dari Sekretaris Negara Hillary Clinton dihadapan *Senate Committee on Foreign Relations* pada bulan Januari 2009.

²⁸ US Department of State, *Fact Sheet: New United States Policy on Landmines: Reducing*

“The incoming Administration has not taken a position on the landmines treaty. We are committed to working with our friends and allies around the world to reduce the threat posed by landmines.”²⁹

Amerika Serikat mengambil sikap resmi (dengan sekretaris negara sebagai parameternya) untuk tidak menandatangani dan mengambil bagian dalam Perjanjian Internasional apapun mengenai ranjau, melainkan memilih untuk tetap melakukannya dengan cara mereka sendiri, bersama negara-negara dan LSM aliansi. Meskipun setelah pernyataan Clinton itu, berbagai NGO anti-ranjau datang menghadap dan menggelar lobi agar Obama melakukan peninjauan ulang atas keputusan ini, tetapi tak digubris. Arah kebijakan Amerika Serikat mengenai ranjau sekurang-kurangnya hingga era Obama berakhir, terbaca jelas dari pernyataan dan sikap tersebut.

Pernyataan Hillary Clinton tersebut memperjelas sikap Amerika Serikat yang sudah kerap mangkir dari konferensi internasional mengenai ranjau darat sejak tahun 2005. Di lain pihak, para aktivis anti-ranjau tak gusar-gusarnya mengajak Amerika Serikat bergabung dan mengambil bagian dalam Konferensi. Bahkan pada tahun 2009, pemimpin Kolombia sendiri yang berbicara langsung pada Amerika Serikat agar menghadiri konvensi di Cartagena. Waktu itu pihak Amerika Serikat membalas ajakan Kolombia dengan “Nanti akan kami pikirkan lagi”.³⁰

²⁹http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=2009&pqs_type=l m&pqs_report=usa&pqs_section=%23ten-year_summary#ten-year_summary (diakses pada tanggal 5 November 2010, pukul 10.19 WIB)

³⁰ Diambil dari http://www.themonitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=2009&pqs_type=l m&pqs_report=usa&pqs_section=%23ten-year_summary#ten-year_summary

Bila ditinjau kembali secara kronologik, terdapat dua titik kunci perkembangan kebijakan Amerika Serikat mengenai ranjau darat:

1. Titik Kunci Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sejak tahun 1999

Amerika Serikat terbukti tidak menggunakan ranjau pada operasi di Kosovo, dan berikutnya diikuti penarikan ranjau dari Afganistan pada bulan Oktober 2001. Disamping ketidak bersediaan mereka untuk meratifikasi perjanjian ranjau manapun, Amerika Serikat mengucurkan dana senilai total 421,4 juta dollar antara tahun 1999 hingga 2003. Tindakan yang tidak konsisten ini mengundang banyak pertanyaan. Sebab dengan bantuan sebanyak itu, kenapa Amerika Serikat tidak sekalian saja meratifikasi *Ottawa Process*. Toh, berarti kedua pihak tengah menuju arah yang sama dengan mekanisme teknis yang kurang lebih sama. Penolakan Amerika Serikat terhadap *Ottawa Process* tak kuasa membawanya lebih jauh untuk mempertahankan stok ranjau diluar negeri, mereka harus menarik timbunan ranjau dari Italia, Norwegia, Spanyol, wilayah Guantanamo, dan stok ranjau darat dari lepas pantai Kuba.

2. Titik Kunci Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat sejak tahun 2003

Seperti telah dijelaskan didepan, era Bush yang berkuasa mulai tahun 2003 secara eksplisit menyatakan mereka tak sedang bergerak kearah ratifikasi perjanjian terhadap ranjau darat. Bantuan luar negeri yang dikucurkan pemerintah juga menurun menjadi 93 juta US Dollar terhadap 37 negara korban ranjau, namun terdapat peningkatan dengan dibentuknya satu program penelitian yang dibiayai pemerintah, dan 2 LSM yang digalang oleh pemerintah.

Setiap poin kebijakan tersebut, apabila dipertemukan satu sama lain niscaya akan menimbulkan ambiguitas. Ada inkonsistensi antara tindakan Amerika Serikat terhadap *Ottawa Process* dan tindakan luar negeri mereka terhadap bantuan luar negeri dan laku internal mengenai ranjau darat. Apa sebenarnya maksud yang mendasar Amerika Serikat untuk menegaskan bahwa mereka tidak akan meratifikasi perjanjian manapun mengenai ranjau darat? Dan akan mengusahakannya sendiri beserta Negara-negara dan LSM aliansi? Tindakan ini mengindikasikan ada kepentingan nasional tertentu yang sangat rapuh akan tuntutan hukum tetapi sangat krusial bagi kepentingan internal Amerika Serikat. Tak peduli bagaimanapun kisruhnya citra Amerika Serikat dihadapan ratusan delegasi dalam konferensi, mereka tetap lebih memilih malu daripada menandatangani perjanjian yang jelas-jelas untuk perdamaian. Tentulah sesuatu yang dilindungi dan diusahakan.

B. Mine Action Funding

Sekilas, kebijakan Amerika Serikat untuk memberi bantuan kepada negara korban ranjau bertolak belakang dengan kegigihan mereka mempertahankan berbagai sektor industri ranjau dalam negeri. Pada tahun 1993, Pemerintah mendirikan

US Humanitarian Demining Program. Pada awal berdirinya, mereka mengklaim telah berkontribusi sebesar 263 juta US dollar untuk membasmi ranjau. Namun perlu dicatat bahwa 63 juta US Dollar (lebih dari seperempatnya) dipakai untuk proyek internal demining program yang berlangsung di dan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Berikut ini tabel singkat aliran dana US

Humanitarian Demining Program

Tabel 3.3

Tabel Distribusi Mine Action Funding³¹

Tahun	Jumlah Dana (dalam juta US dollar)	Jumlah Negara Penerima
1993	10,2	5
1994	15,9	7
1995	39,2	10
1996	32,8	12
1997	45,5	13
1998 (perkiraan)	66,1 - 91,8	21
1999 (perkiraan)	65,8 - 100	23

Dari aliran dana selama enam tahun tersebut (1993 – 1999), berikut adalah daftar negara-negara korban yang menerimanya dalam jumlah yang cukup besar (*major recipients*).

³¹ <http://www.damining.com/btrco.com/policy/publication/2010.htm> (diakses 14/10/2014)

Tabel 3.4

*Major Recipients Mine Action Funding tahun 1993 – 1999*³²

Negara	Jumlah Dana (dalam juta US dollar)
Bosnia	28,7
Afghanistan	21,4
Mozambique	20,4
Kamboja	18,4
Laos	14,8
Rwanda	14,2
Kawasan Amerika Tengah	11,0
Eritrea	10,2
Ethiopia	9,5
Angola	9,1
Namibia	8,4
Yaman	4,7
Chad	4,1
Yordania	3,9
Zimbabwe	3,0

Selain bantuan dana, tahun 1997 Amerika Serikat juga mengerahkan 1.200 orang relawan lokal yang dilatih oleh 300 tentara militer untuk menjinakkan ranjau dilapangan, mereka dibantu oleh 14.000 relawan terlatih dari Amerika Serikat untuk membantu secara teknis.mereka turun langsung kelapangan dinegara-negara seperti Bosnia, Kamboja, dan Afghanistan dan menyediakan peralatan lapangan untuk negara-negara lain. Di Rwanda, pemerintah Amerika Serikat bahkan menyediakan hewan terlatih yang piawai mengendus keberadaan ranjau, yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Departemen Pertahanan.

³² http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=1999&pqs_type=lm&pqs_report=u
ce (diunduh pada tanggal 1 November 2010, Pukul 10:45 WIB)

*"The Secretary of Defense shall ensure that no member of the armed forces...engages in the physical detection, lifting, or destroying of landmines unless the member does so for the concurrent purpose of supporting a United States military operation."*³³

Departemen pertahanan juga membiayai program pembasmian ranjau yang mereka sebut *Overseas Humanitarian, Disaster, and Civic Aid* (OHDACA) yang dilindungi oleh undang-undang Negara. OHDACA berkaitan erat dengan pemberhentian proliferasi, Antiterorisme, penjinakan ranjau dan program-program yang berkaitan (*Nonproliferation, Antiterrorisme, Demining, and Related Programs*). Tahun 1997, Sekretaris Negara Madeleine Albright mengumumkan target mereka bahwa pada tahun 2010, dunia sudah harus terbebas dari ancaman ranjau darat, yang menjadi tujuan dibentuknya *Office of Global Humanitarian Demining*. Badan ini dibentuk sebagai respon politis atas ditolaknya aspirasi Amerika Serikat dalam Negosiasi di Oslo.

Pada tahun 2001, Negara penerima dana untuk membasmi ranjau dari Amerika Serikat meningkat menjadi 37 negara. Namun tahun paling dramatis adalah rentang setahun antara 1998 – 1999 dimana 19 negara diterima menjadi bagian dari *US demining assistance program*. Didalamnya termasuk Azerbaijan, Jibouti, Oman, Vietnam dan Zambia. Tercatat ada tiga Negara yang ditolak yakni Aljazair dan

³³ *Title 10, United States Code, Section 401* (Termasuk perubahan pada tahun fiskal 1997. DoD Authorization Act, HAL.L. 104-201), section (a)(4)(A), sebagaimana dikutip dalam http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=1999&pqs_type=lm&pqs_report=u

Burundi, dengan alasan bahwa konflik internal tengah memanas di Negara-negara tersebut sehingga berpotensi mengganggu kelancaran proses penjinakan. Satu negara lagi adalah Malawi, sebab tidak ditemukan adanya jumlah ranjau yang berarti seperti yang dilaporkan oleh Pemerintah mereka.

Pada tahun 2002, Amerika Serikat membawa program *Mine Action Fund*-nya kedalam lembaga-lembaga yang lebih spesifik. Tercipta *Slovenia International Trust Fund* (ITF) yang berkonsentrasi menyalurkan bantuan Amerika Serikat di Negara-negara Balkan. Terdapat juga *Quick Reaction Demining Force* (QRDF) yang berada dibawah *Office of Global Humanitarian Demining* yang berpusat di Mozambik dan tentu saja berkonsentrasi untuk membantu penjinakan ranjau dikawasan sekitar Negara tersebut dan beberapa kali juga membantu program penjinakan ranjau di Asia Selatan, terutama Sri Lanka. *The State's Department Office of Mine Action Initiatives and Partnership* (PM/MAIP) adalah badan khusus yang menghimpun LSM-LSM serta badan usaha privat untuk bekerja sama membereskan persoalan ranjau. PM/MAIP menaungi hampir 30 lembaga dari berbagai Negara (terutama AS sendiri) untuk melakukan berbagai aksi pembasmian ranjau. sekitar 250.000 warga Amerika Serikat pernah berpartisipasi langsung dalam badan ini baik itu sebagai donatur maupun sukarelawan. 170.000 diantaranya dihimpun dari LSM yang turut bekerja sama. Mereka bahkan bekerja sama dengan LSM yang khusus konsen pada bidang

The Polus Center for Social and Economic Development, Global Care Unlimited, dan Grapes for Humanity.

Pada tahun 2008, Amerika Serikat tidak lagi konsen pada pengembangan organisasi sebab memang kerap kali dikritik terlalu struktural dan militeristik. Mereka pun beralih pada pertolongan korban (*Victim Assistance*). "To Walk the Earth in Safety 2009" adalah program yang dipersiapkan sejak tahun 2008 dan adalah salah satu contoh program serius pemerintah Amerika Serikat dalam membantu para korban ranjau dengan arah yang lebih personal dan kultural. Mereka menghabiskan 83,4 juta US dollar hanya untuk program ini saja di 32 negara, dengan dua penerima terbesar yakni Afghanistan dan Irak, dua Negara bekas tempat Amerika "bermain lumpur".

Negara-negara ini juga digilir, mereka yang sudah menerima bantuan (dengan asumsi bahwa terjadi kemajuan dalam hal *victim assistance*) tak lagi diberi bantuan pada tahun berikutnya, sebab ada negara lain yang baru memulai program. Benin, Burundi, Chad, Mauritania, Senegal, Thailand, dan Tunisia yang ambil bagian dalam program tahun 2007 tak lagi diikuti pada tahun 2008 sebab ada area lain yang dipandang lebih membutuhkan, seperti Ethiopia, Yordania, Peru, Armenia, Filipina, Liberia, dan Montenegro.

Program pendampingan korban ini bukanlah tanpa cacat, tersirat ada kesan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak sungguh-sungguh dalam programnya ini. Sebab alih-alih memperluas area bantuan, ia malah menggilir mereka. Kesan lain

membisikkan bahwa lewat program *Victim Assistance* ini, hal pertama yang ingin dicapai Amerika Serikat adalah bagaimana mereka tidak dituntut “terlalu keras” oleh negara-negara yang pernah mereka bantu untuk menutup industri ranjau darat dalam negeri mereka seperti yang disuarakan lantang oleh *Ottawa Process*. Karena hal itu secara moral akan termasuk didalam hubungan resiprokal, siapa memberi apa dan dapat apa *in reverse*. Kecurigaan ini tidak baik bila ditengarai tanpa data dan kerangka teoritis yang jelas. Bab berikutnya akan mengurai silang sengkabut masalah lewat kacamata teori yang telah diungkapkan di bab pertama